

Diunggah : Oktober 2022

Diterima : Februari 2023

Dipublikasi : Juli 2023

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN BERBASIS NILAI-NILAI BELA NEGARA

Erna Hernawati

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
erna.hernawati@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela negara pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Metode yang digunakan adalah filosofi humanisme dengan kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi yaitu mengenali diri peneliti lebih dalam sehingga bela negara memang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bela negara memiliki nilai yang mendukung terlaksananya tata Kelola perusahaan yang baik seperti tanggung jawab, integritas, transparansi, independensi, kewajaran dan reputasi.

Kata Kunci: bela negara, humanisme; tata kelola perusahaan

Abstract

This study aims to induce the principles of state defense in the principles of corporate governance. The method used is the philosophy of humanism with the study of ontology, epistemology, and axiology, namely knowing the researcher's self more deeply so that defending the country is indeed appropriate. The results of this study indicate that defending the country has values that support the implementation of good corporate governance such as responsibility, integrity, transparency, independence, fairness, and reputation.

Keywords: corporate governance; humanism; patriotism;

PENDAHULUAN

Corporate Governance menjadi sorotan dan naik daun di Indonesia sejak krisis keuangan yang menimpa perekonomian Indonesia pada Tahun 1998 dan 2008. Banyak perusahaan yang tidak dikelola secara bertanggung jawab, mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Budiati, 2012). Regulasi penopang Corporate governance diperkuat sejak 1998. Dari dibentuknya KNKG hingga penyempurnaan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan terbatas memperkuat sendi-sendi CG di negeri ini. Sistem tata kelola perusahaan pada tingkat internasional juga menjadi pedoman seperti The Sarbanes-Oxley Act (SOX), *Code of Corporate Governance* di Singapura, BAPEPAM (sekarang OJK) di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efisiensi investasi, kepercayaan dan perlindungan investor, dan ekonomi secara keseluruhan.



Namun setelah berjalan 24 tahun upaya penyelenggaraan tata kelola yang baik, kasus pelanggaran GCG masih marak dan terkesan lebih berani, kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan pihak swasta, pejabat pemerintah daerah dan pusat bahkan penegak hukum. Ini menjadi gambaran yang memprihatinkan walaupun dalam masa pandemi kasus penggelapan masih saja terjadi.

Sayangnya pedoman dan regulasi hanya menjadi pedoman, tidak merasuk ke jiwa. Ini dapat terlihat dalam indeks *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dirilis oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICD), beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Antam, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk yang terlibat skandal pelaporan keuangan serta PT Indofarma Tbk yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Tidak hanya itu, indeks korupsi di Indonesia yang dirilis oleh *Corruption Perception Index 2022* juga masih sangat tinggi dengan peringkat 96 dari 180 negara. Dari sisi skor juga tidak terdapat perbedaan signifikan sejak 2017. Mendukung data tersebut, rilis "Survei Fraud Indonesia" oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Chapter Indonesia (2019) mengungkapkan bahwa kecurangan dalam bentuk korupsi dan penyalahgunaan aset adalah yang paling banyak ditemukan dan paling merugikan di Indonesia. Dalam rilis tersebut juga mengungkapkan kronisnya penegakan hukum di Indonesia bahwa 58% dari kasus korupsi dan kecurangan mendapatkan vonis kurang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku korupsi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian harus melihat aspek hukum yang memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian. Buramnya pemisahan fungsi ini menjadi perdebatan, misalnya di Australia, antara agen dan principal lebih banyak didiskusikan pada ranah hukum. Sedangkan di Indonesia kajian ini masuk dalam ranah akuntansi. Dibalik itu, ada sisi negatif atas buruknya *corporate governance*, yang pada akhirnya bermuara pada satu hal yaitu *self interest* atau kepentingan diri sendiri (Kamayanti, 2019, pp. 34–35; Mulawarman & Kamayanti, 2018).

Dewan komisari juga memiliki peran strategis dalam tegaknya tata kelola yang baik. Tapi penentuan dewan komisaris tersebut kurang terbuka (Wirawan & Diyanty, 2014). Unsur politik dalam konteks ini seperti argumen dari (Vermonte, 2012) mengenai timbulnya hubungan timbal balik antara partai politik dengan perusahaan atau individu bermodal besar. Indonesia juga memiliki rekam jejak mengenai hubungan antara perusahaan dan politisi yang kuat mulai pada era Presiden Soeharto (Fisman, 2001), dan masih terus berlanjut hingga pasca reformasi. Beberapa perbedaan atas manfaat perusahaan terkoneksi politik adalah memitigasi perilaku oportunistik dalam pelaporan keuangan sehingga kualitas laba juga meningkat. (Batta, Heredia, & Weidenmier, 2014; Heese, Khan, & Ramanna, 2017; Humphery-Jenner & Powell, 2014; Jennings, Kartapanis, & Yu, 2021; Ramantha, 2020).

Hal tersebut berseberangan dengan (Bliss & Gull, 2012; Bramm, Nandy, Weitzel, & Lodh, 2015; Chaney, Faccio, & Parsley, 2011; He, Wong, & Young, 2012; Hope, Yue, & Zhong, 2020; Mingming, 2002; Piotroski, Wong, & Zhang, 2015; Sani, Latif, & Al-Dhamari, 2020) bahwa informasi akuntansi dan kualitas laba cenderung rendah bagi perusahaan yang terkoneksi politik dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi. (Gross, Königsgruber, Pantzalis, & Perotti, 2016) memberikan alasan atas perilaku oportunistik ini dikarenakan perusahaan terkoneksi politik

memiliki risiko ketidakpastian yang lebih tinggi terhadap kebijakan administrasi. Risiko ini akan membuat profitabilitas operasi masa depan lebih volatile sehingga manajemen laba menjadi keniscayaan. Lalu bagaimana dengan BUMN di Indonesia? ICW masih menemukan pelanggaran terhadap aturan Kementerian BUMN No. 3, Tahun 2012 ICW mengidentifikasi 397 komisaris yang rangkap jabatan pada BUMN. Lembaga tersebut juga mengidentifikasi beberapa faktor penyimpangan pengisian komisaris di antaranya: Faktor rente yaitu komisaris menjadi agen dari rezim berkuasa untuk pengamanan proyek, Faktor politik sebagai akomodasi balas jasa, akomodasi orang kritis untuk dibungkam dengan jabatan, dan akomodasi kelompok ahli. Akibatnya BUMN melakukan kasus fraud lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta (Marbun, Putra, & Wijayanti, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela negara ke dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Selain untuk meminimalisir kejahatan keuangan, peneliti juga ingin menerapkan rasa cinta tanah air dalam bidang akuntansi, secara khusus bidang *corporate governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Bela negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Suatu wujud tekad sikap, dan tindakan warga negara yang teratur dengan dilandasi kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa-bernegara (Agung, 2016). Tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada namun juga sebagai upaya menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Pengamalan nilai-nilai ini dipandang penting karena di era globalisasi, arus informasi dan budaya global masuk dengan deras dan berdampak luas kepada perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara (Hadi & Al, 2019).

Sejarah menunjukkan bahwa, konfrontasi bersenjata merupakan aspek penting dalam mempertahankan negara, namun di era globalisasi, spektrum bela negara menjadi semakin luas dan tidak terpaku dengan satu cara. Pada masa perang fisik, warga negara menyatakan hak dan kewajibannya dengan konfrontasi bersenjata, sedangkan dewasa ini cita-cita dan tujuan nasional diwujudkan melalui pembangunan nasional, dimana warga negara menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan bidang yang mereka kuasai sebagai dampak dari globalisasi.

Secara teoritis, Bela Negara menurut adalah suatu pemikiran, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk membela bangsa dan negaranya. Kenny Erlington menyampaikan bahwa Bela Negara adalah sikap warga negara yang berupaya mempertahankan negara menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kepentingan negara. John McKinsey menyebutkan bahwa Bela Negara merupakan wujud nyata dari nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang tercermin dalam setiap warga negara, sehingga mutlak dimiliki oleh warga negara agar negaranya menjadi kuat (Subagyo, 2015). Secara khusus, terdapat beberapa landasan hukum yang memayungi bela negara yaitu terdiri dari Pasal 27 ayat 3 UUD 1945; Pasal 30 ayat 1 & 2 UUD 1945; Pasal 68 UU RI No. 39 Tahun 1999;

Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 2002; serta Pasal 8 ayat 1 & 2 UU RI No. 3 Tahun 2002.

Bela Negara sebagai sikap, prinsip, karakter harus bertransformasi di era globalisasi. (Friedman, 2002) menjelaskan bahwa bumi menuju hubungan yang datar. Datar dalam arti batas ruang dan waktu semakin tipis. Lebih lanjut globalisasi mengandung makna transformasi ideologi dan teknologi. Ideologi menjadi arah dan cara pandang dalam bertindak. Sedangkan teknologi sebagai instrumen untuk melancarkan aktivitas. Dengan demikian ada relasi antara Bela negara sebagai bagian dari prinsip, cara pandang, nilai dan teknologi sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai Bela Negara sebagai sebuah bangsa yang plural dan bhineka.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap warga negara diwajibkan ikut serta dalam usaha bela negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing jika diperlukan. Sesuai dengan konteks suatu profesi bela negara merupakan pembinaan kesadaran bela negara yang bertujuan untuk menanamkan nilai dasar bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Bela negara bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melestarikan budaya, serta menjaga keutuhan identitas dan keutuhan negara. Ruang lingkup bela negara sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya, dan lain-lain (Ekaputra, 2021).

Sebagai bangsa yang bhineka, Indonesia harus mampu menjadikan nilai-nilai bela negara sebagai prinsip, karakter dan cara pandang. Sebab Bela Negara adalah landasan yang membuat bhineka bisa berdiri tegak sampai saat ini. Sebab, implikasi dari kebhinekaan adalah konflik sosial jika tidak dikontrol dengan baik. Jika bhinneka tidak dijaga dengan nilai-nilai dasar Bela Negara maka konflik laten bisa terus terjadi. Namun, pemaknaan nilai-nilai Bela Negara harus direduksi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab di era globalisasi dengan pertarungan antar ideologi dan teknologi Bela Negara harus menjadi simbol perekat dan perdamaian. Artinya nilai Bela Negara harus mengikuti dan menyesuaikan peluang dan menepis tantangan zaman yang selalu berubah dengan cepat. Masa depan Indonesia akan mengkhawatirkan jika tidak dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Ancaman globalisasi dan kondisi geopolitik dunia yang ditengarai semakin buruk dan tidak pasti memberikan spekulasi yang pesimis, bagaimana kepastian selanjutnya? Maka, di tengah hiruk pikuk ketidakpastian itu, diperlukan suatu upaya mitigasi ke depannya agar bangsa ini tidak terancam eksistensinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan humanisme (Lamont, 1997) yang menunjukkan hakikat diri peneliti sesungguhnya, secara ontologi dan aksiologi, peneliti merasakan bahwa diri peneliti adalah warga negara Indonesia yang lahir dan menjunjung nilai-nilai nasionalis. Peneliti merasakan nilai-nilai luhur dalam budaya Indonesia yang apabila nilai luhur tersebut diterapkan dalam perusahaan komersial maka akan memberikan dampak yang baik untuk negeri ini. Secara epistemologi, menjelaskan bahwa peneliti dianugerahi akal dan hati untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yang apabila salah satunya ditinggalkan maka ada kecacatan dalam ilmu pengetahuan. Untuk itu peneliti mengintegrasikan akal dan hati, secara rasional dan menggunakan rasa cinta tanah air.

Menyikapi hal tersebut, bela negara bisa menjadi urgensi yang penting sebagai solusi mitigasi. Bela negara adalah suatu konsepsi yang menekankan pentingnya nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, sebagai upaya mendidik anak bangsa agar lebih mencintai tanah air. Konsepsinya tidak hanya militeristik yang selama ini menjadi label masyarakat pada umumnya, tetapi juga bisa melalui pendidikan yang bersifat nonmiliter dengan menekankan nilai-nilai sipil. Pengimplementasian bela negara karenanya bisa juga dilakukan melalui pendidikan. Usaha Bela Negara diwujudkan dalam setiap aktivitas Warga Negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-nilai Bela Negara

Secara garis besar implementasi nilai-nilai bela negara dapat dijabarkan dari beberapa hal, *pertama*, cinta tanah air, yaitu Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman. sikap warga negara Indonesia terhadap upaya mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, dan mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan.

Berbicara mengenai cinta tanah air, tentu saja tidak terlepas dari indikator-indikator yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu Jaga tanah, Pekarangan dan seluruh ruang wilayah Indonesia; Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia; Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya; menjaga nama baik bangsa dan negara; memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa; dan bangga menggunakan produk dalam negeri.

Kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, serta selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, adat, bahasa daerah, seni budaya, kebiasaan dan sebagainya. Dalam hal ini tentang bagaimana masyarakat memandang sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dalam hal ini bagaimana masyarakat menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar sebagian bagian Bela Negara, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai Luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan.

Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Hal ini berbicara mengenai rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya, mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih.

Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, Kondisi kesiapan dan kesanggupan warga negara yang mengandung semangat membela negara sesuai dengan keterampilan, keahlian/profesinya guna mewujudkan Negara yang berdaulat, adil dan makmur. Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati.

Keenam, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Hal ini terkait sikap masyarakat yang tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat, memperjuangkan kedaulatan rakyat,

keadilan dan hak Asasi manusia, mempraktekkan *clean and good governance* dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, menerapkan jiwa, semangat dan nilai perjuangan 1945, dan memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat.

Penerapan Bela Negara pada Aspek Militer dan Non Militer

Bela negara membutuhkan sikap nasionalis dan patriotik yang tinggi. Perwujudan bela negara dapat dilakukan di berbagai aspek atau bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Contoh perwujudan bela negara dalam bidang ekonomi adalah mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri yang berkualitas serta mendukung UMKM. Menghindari sikap individualis dan apatis, serta gaya hidup hedonis, hidup hemat, berusaha meningkatkan taraf hidup, dan bekerja keras mencari nafkah (Harruma, 2022).

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu bagian dari Ketahanan Nasional. LEMHANNAS RI (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia) mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai “kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan memanfaatkan serta mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya”. Aspek kehidupan nasional pada definisi di atas dibagi menjadi *Trigatra*, yang terdiri dari tiga gatra alamiah yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu: geografi, demografi dan sumber kekayaan alam; serta *Pancagatra* yang terdiri dari lima gatra dinamis, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, bila bangsa dan negara Indonesia dapat mendayagunakan secara optimal ketiga gatra alamiah untuk menciptakan kondisi kelima gatra dinamis menjadi baik, maka Indonesia akan ulet dan tangguh menghadapi segala ancaman yang ada (Tumbol, Joko, & Baliyanto, 2017).

Disisi lain jika bangsa gagal menerapkan aspek trigatra dan pancagatra, terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu kestabilan suatu negara, ancaman tersebut adalah ancaman yang bersifat militer dan non militer. Ancaman yang bersifat militer antara lain adalah agresi (invasi, bombardemen, blokade), pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata dan perang saudara menggunakan senjata. Sedangkan ancaman yang bersifat nonmiliter diantaranya, Imigrasi gelap, illegal fishing, Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya.

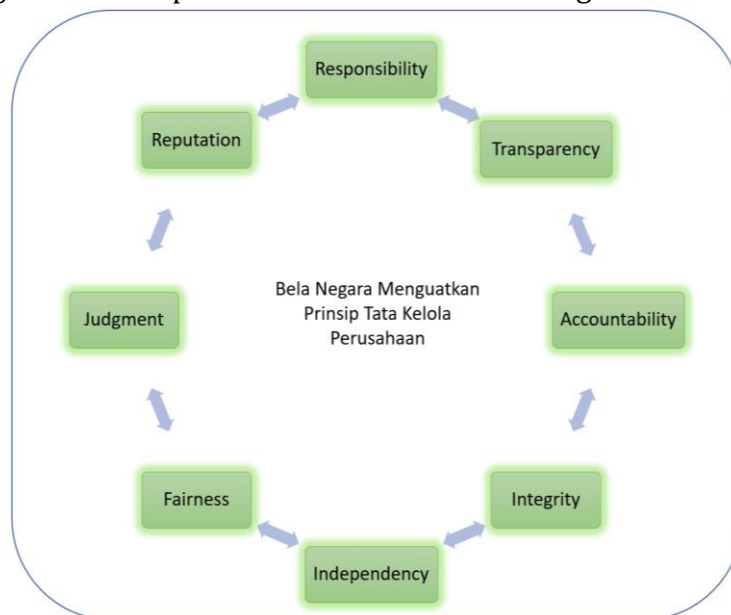
Penerapan CG Berorientasi Bela Negara

Dari enam nilai bela negara yang telah dipaparkan sebelumnya dikaitkan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dapat mendukung memaksimalkan prinsip tersebut. Pertama, pengaitan nilai cinta tanah air. Penjagaan tanah air dan berkontribusi pada kemajuan bangsa adalah bagian dari upaya memperkuat pengembangan tanggung jawab pada semua pemilik peran dalam tata kelola perusahaan. Rasa kebanggaan atas dan menjaga nama baik bangsa harus

diwujudkan dalam integritas dan menjadi reputasi dalam nilai tata kelola perusahaan. Adanya jiwa patriotisme akan memberikan warna yang jelas dalam proses pengambilan keputusan, upaya yang optimal dalam menjalankan prinsip transparansi, berorientasi pada peningkatan perekonomian bangsa dengan menggunakan produk dalam negeri dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari independensi.

Kedua, pengaitan nilai sadar berbangsa dan bernegara. Bahwa terdapat tingkat kesadaran yang optimal bahwa adanya keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang senantiasa menjaga kerukunan, gotong royong, dan menghargai orang lain adalah bentuk dari aktualisasi keadilan dalam berbisnis. Bertanggung jawab menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan aktif menjaga kedaulatan negara, serta akuntabel dalam koridor ketaatan hukum dan aturan perundangan. Partisipasi dalam kegiatan pemilu (atau dalam konteks pemegang saham yaitu partisipatif dalam kaitannya menggunakan hak suara) sehingga memaksimalkan potensi penilaian yang baik. Serta berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik sehingga menjaga integritas dan reputasi.

Gambar 1. Penguatan Prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan Nilai Bela Negara



Ketiga, pengaitan nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dari aspek ini, prinsip tata kelola perusahaan harus sejalan dengan nilai Pancasila dan ideologi negara sehingga dapat menginternalisasikannya untuk mewujudkan cita-cita negara. Keempat, pengaitan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini, stakeholder dapat memperjuangkan kepentingan bangsa dengan terjun langsung kepada hal-hal yang vital dalam perusahaan yang betul-betul dipahaminya (dalam lingkup profesi dan rolenya) sehingga adanya penguatan rasa tanggung jawab. Gemar membantu sesama dan mengorbankan sumber daya untuk kepentingan bersama sehingga memperkuat aktualisasi nilai keadilan. Serta, selalu dalam keadaan siap siaga jika terdapat ancaman bagi resiliensi perusahaan

terhadap kecurangan karena pembangunan perusahaan adalah upaya membangun bangsa, serta mempercayai bahwa pengorbanan pada rolenya adalah tidak sia-sia.

Kelima, pengaitan nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Merupakan kebutuhan untuk setiap individu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual yang baik sehingga dapat memberikan penilaian yang terbaik. Dilengkapi dengan sehatnya jiwa dan raga karena keadilan dibutuhkan juga untuk diri sendiri. Serta mendisiplinkan etos kerja dan terampil dalam menolong yang membantu mengaktualisasikan integritas dan menjadi reputasi yang baik. Terakhir, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur yang ditujukan kepada pemaksimalan potensi role dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan kapabilitas diri sehingga berguna untuk perusahaan, serta yang paling penting adalah tidak menjadi benalu dan berpikiran sempit untuk memperkaya diri sendiri serta aktif untuk meningkatkan upaya menghindari kecurangan baik dari diri sendiri atau dari rekan kerja.

Tabel 1. Kaitan Nilai Bela Negara terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan

NO	NILAI-NILAI BELA NEGARA	PRINSIP GCG TARIF+ YANG DIDUKUNG
1	Cinta Tanah Air	
	a. Jaga tanah, pekarangan dan seluruh ruang wilayah Indonesia	Responsibility, Integrity
	b. Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia	Integrity dan Reputation
	c. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya	Transparency, Integrity
	d. Jaga nama baik bangsa dan negara	Integrity, Reputation
	e. Beri kontribusi pada kemajuan bangsa	Responsibility, Integrity
	f. Bangga gunakan produk dalam negeri	Independency, Integrity
2	Sadar Berbangsa dan Bernegara	
	a. Sadar akan keragaman suku bangsa, agama, bahasa dan budaya	Fairness, Responsibility
	b. Jaga kerukunan, gotong royong, menghargai orang lain	Fairness, Responsibility
	c. Jalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara	Responsibility, Integrity
	d. Taat hukum dan peraturan perundangan	Accountability, Integrity
	e. Ikut serta dalam pemilu	Judgment, Independency
	f. Berpikir bersikap dan berbuat yang terbaik	Integrity dan Reputation
	g. Berpartisipasi aktif jaga kedaulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan	Responsibility, integrity
3	Setia kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara	

a. Paham nilai-nilai Pancasila	Prinsip GCG harus sejalan dengan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara
b. Mengaktualisasikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial	
c. Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita negara	
4 Relu Berkorban untuk Bangsa dan Negara	
a. Membantu korban bencana alam, mengajar di daerah terpencil, menjadi bidan desa, penyuluh pertanian, penjaga hutan Negara, dll	Responsibility, Integrity
b. Gemar membantu sesama	Fairness, Responsibility
c. Relu mengobarkan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara	Fairness, Integrity
d. Siap bela bangsa dan negara dari berbagai ancaman	Integrity, Responsibility
e. Aktif dalam pembangunan bangsa	Integrity, Accountability, Responsibility
f. Percaya pengorbanan untuk bangsa tidak sia-sia	Integrity
5 Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara	
a. Memiliki kecerdasan emosional (EQ), spiritual (ES), adversitas (AQ) dan Intelektual (IQ)	Judgment, Integrity
b. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raga serta berpola hidup sehat (fisik & psikis)	Fairness, Responsibility
c. Disiplin memiliki semangat & daya juang serta etos kerja yang baik	Integrity dan Reputation
d. Terampil menolong	Integrity dan Reputation
6 Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur	Transparency, Accountability, Responsibility, Fairness, & Independency

SIMPULAN

Dari penerapan nilai-nilai bela negara dalam prinsip tata kelola perusahaan diharapkan dapat menjadi insentif yang baik kepada pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, baik lingkup manajemen, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, bahkan pihak eksternal yang vital dalam sistem tata kelola perusahaan seperti media dan regulasi pemerintah, akademisi, dan pihak eksternal lainnya untuk dapat melihat kepengurusan perusahaan bukan sebagai aktivitas ekonomi

saja, melainkan terdapat nyawa aktivitas bela negara yang dapat menentukan kemajuan bangsa.

Tataran bela negara saat ini masih banyak terimplementasi dalam tataran konsep, seremonial harus terinternalisasi menjadi *value* yang akan memberi efek konkrit Indonesia menjadi negara yang menjalankan praktek praktek baik prinsip *good corporate governance* dan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan peringkat sangat baik dalam berbagai indikator *corporate governance*

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. B. W. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Bela Negara*. Bali: Universitas Udayana.
- Batta, G., Heredia, R. S., & Weidenmier, M. (2014). Political connections and accounting quality under high expropriation risk. *European Accounting Review*, 23(4), 485–517. <https://doi.org/10.1080/09638180.2014.906316>
- Bliss, M. A., & Gull, F. A. (2012). Political connection and leverage: Some Malaysian evidence. *Journal of Banking & Finance*, 36, 2344–2350. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.04.012>
- Bramm, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. *The International Journal of Accounting*, 50(2), 111–141. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009>
- Budiati, L. (2012). *Good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51, 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Ekaputra, T. (2021). Kolaborasi, Kunci Sukses Gerakan Nasional Bela Negara di Era Digital. Retrieved from <https://kumparan.com/tarsih-ekaputra1539592155247/kolaborasi-kunci-sukses-gerakan-nasional-bela-negara-di-era-digital-1wSm9RHjIHI/full>
- Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connection. *The American Economic Review*, 91(4), 1095–1102.
- Friedman, T. L. (2002). *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun (Terjemahan)*. Bandung: ITB.
- Gross, C., Königsgruber, R., Pantzalis, C., & Perotti, P. (2016). The financial reporting consequences of proximity to political power. *Journal of Accounting Public Policy*, 35(6), 609–634. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.007>
- Hadi, P., & Al, E. (2019). *Pedoman Penerapan Bela Negara*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Harruma, I. (2022). Perwujudan Bela Negara dalam Bidang Ekonomi. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/00000031/perwujudan->

bela-negara-dalam-bidang-ekonomi

- He, X., Wong, T. J., & Young, D. (2012). Challenges for implementation of fair value accounting in emerging markets: Evidence from China. *Contemporary Accounting Research*, 29(2). <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01113.x>
- Heese, J., Khan, M., & Ramanna, K. (2017). Is the SEC captured? Evidence from comment-letter reviews. *Journal of Accounting and Economics*, 64, 98–122. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.06.002>
- Hope, O. K., Yue, H., & Zhong, Q. (2020). Do different political connections affect financial reporting quality differently? *Contemporary Accounting Research*, 37(2), 1015–1043. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12557>
- Humphery-Jenner, M., & Powell, R. (2014). Firm size, sovereign governance, and value creation: Evidence from the acquirer size effect. *Journal of Corporate Finance*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.02.009>
- Jennings, R., Kartapanis, A., & Yu, Y. (2021). Do political connections induce more or less opportunistic financial reporting? Evidence from close elections involving SEC-influential politicians. *Contemporary Accounting Research*, 38(2), 1177–1203. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12642>
- Kamayanti, A. (2019). *Akuntansi Keperilakukan*. Jakarta: Rumah Peneleh.
- Lamont, C. (1997). *The Philosophy of Humanism*. New York: Humanist Press.
- Marbun, R. V., Putra, A. M., & Wijayanti, A. (2021). Koneksi Politik dan Manajemen Skandal: Sebuah Temuan Empiris Perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2).
- Mingming, W. (2002). The Third Eye: Toward a Critique “Nativist Anthropology.” *Chinese Anthropology*, 22(2), 149–174.
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Islamic Accounting Anthropology: A Constructivist Methodological Alternative. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 302–311.
- Piotroski, J. D., Wong, T. J., & Zhang, T. (2015). Political incentives to suppress negative information: Evidence from Chinese listed firms. *Journal of Accounting Research*, 53(2), 405–459. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12071>
- Ramantha, I. W. (2020). Fraud pentagon theory in detecting financial perception of financial reporting with good corporate governance as moderator variable. *International Research Journal of Management IT and Social Science*, 7(1), 84–94.
- Sani, A. A., Latif, R. A., & Al-Dhamari, R. A. (2020). CEO discretion, political connection and real earnings management in Nigeria. *Management Research Review*, 43(8), 909–929. <https://doi.org/10.1108/MRR-12-2018-0460>
- Subagyo, A. (2015). *Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tumbol, S. A., Joko, R., & Baliyanto, L. (2017). *Bela Negara dalam Perspektif Strategi*

dan Kebijakan Pertahanan Negara. WIRA. Jakarta.

_____ Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

_____ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 68

_____ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2022, Tentang Pertahanan Negara

Vermonte, P. J. (2012). Mendanai Partai Politik: Problem dan Beberapa Alternatif Solusinya. *Analisis CSIS*, 41(1), 82–94.

Wirawan, B., & Diyanty, V. (2014). Kepemilikan keluarga, hubungan politik dan family aligned board terhadap implementasi tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.

Halaman ini sengaja dikosongkan
untuk kepentingan penggenapan halaman